

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, DAN  
UKURAN DAERAH (SIZE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Alifiana Nur Majid Setyaningrum  
No. Mahasiswa: 18312446

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, DAN  
UKURAN DAERAH (SIZE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Alifiana Nur Majid Setyaningrum

No. Mahasiswa: 18312446

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Kulon Progo, 25 Juli 2022

Penulis,



DGA32AJX563303529

(Alifiana Nur Majid Setyaningrum)

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, DAN  
UKURAN DAERAH (SIZE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Alifiana Nur Majid Setyaningrum  
No. Mahasiswa: 18312446

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal: 29 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

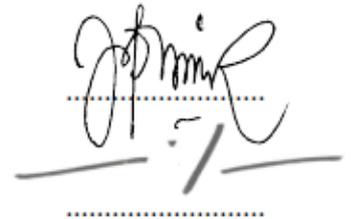
Disusun oleh : ALIFIANA NUR MAJID SETYANINGRUM

Nomor Mahasiswa : 18312446

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 10 Oktober 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, ridha, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah” sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya.

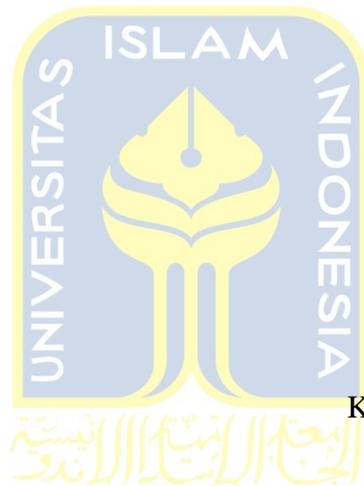
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, saran, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muammar Nur Kholid, S.E., M.Ak, Akt. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

5. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, serta staf akademik yang memberikan pelayanan kepada setiap kebutuhan penulis selama perkuliahan.
6. Ayah Rumiyanta dan Mama Tri Sutrisniasih selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara finansial, psikis, dan fisik.
7. Fadhil, Hana, dan Hafizh selaku adik dari penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi.
8. Simbah Giyah selaku nenek dari penulis yang telah menjadi motivasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Mbah Kakung (Simbah Dwi) selaku kakek dari penulis atas dukungan dan doa yang diberikan.
10. Budhe Suprih, Mbak Ririn, Mas Yoyok, Mbak Dita, dan Mas Aris selaku keluarga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Teman-teman Peachy, yaitu Vika dan Findy yang menjadi penyemangat dan tempat berbagi cerita untuk penulis.
12. Teman-teman Persambatan Cihuy, yaitu Berlian, Ayu, dan Maya yang telah menjadi motivator, tempat berbagi cerita dan ilmu, serta membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
13. Teman-teman Sholihah dan Kelas J yang senantiasa membantu penulis selama perkuliahan.
14. Teman-teman satu bimbingan skripsi bersama Bapak Johan yang senantiasa telah berjuang bersama penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan saran serta motivasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
16. *Last but not least*, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena telah mempercayai diri sendiri, bekerja keras, tidak pernah menyerah, selalu mencoba memberikan yang terbaik, dan menjadi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala masukan, saran, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.



Kulon Progo, 25 Juli 2022

Penulis,

(Alifiana Nur Majid Setyaningrum)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
Abstrak .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	8
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	9
2.1.3 Intergovernmental Revenue .....	9
2.1.4 Leverage .....	10
2.1.5 Ukuran Daerah ( <i>Size</i> ) .....	10
2.2 Penelitian Terdahulu .....	11
2.3 Paparan Hipotesis .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	23
3.2 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.3 Definisi Dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	25
3.3.1 Variabel Dependen (Y) .....	25

3.3.2	Variabel Independen (X)	25
3.3.3	Variabel Kontrol	26
3.4	Metode Analisa	26
3.4.1	Analisis Deskriptif	27
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	27
3.4.2.1	Uji Normalitas	27
3.4.2.2	Uji Heteroskedastisitas	28
3.4.2.3	Uji Multikolinearitas	28
3.4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	28
3.4.4	Uji Hipotesis	30
3.4.4.1	Uji Statistik T (T-test)	30
3.4.4.2	Koefisien Determinasi	30
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>		<b>32</b>
4.1	Analisis Deskriptif	32
4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	33
4.2.1	Uji Normalitas	33
4.2.2	Uji Heteroskedastisitas	34
4.2.3	Uji Multikolinearitas	36
4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	37
4.4	Hasil Uji Hipotesis	39
4.4.1	Uji Statistik T (T-test)	39
4.4.2	Koefisien Determinasi	41
4.5	Pembahasan	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		<b>49</b>
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif .....	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	34
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	36
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda.....	37
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi.....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 .....	2
Gambar 2.1 Model Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel

Lampiran 2 : Data Penelitian Variabel Dependen (Y)

Lampiran 3 : Data Penelitian Variabel *Intergovernmental Revenue* (X1)

Lampiran 4 : Data Penelitian Variabel *Leverage* (X2)

Lampiran 5 : Data Penelitian Variabel Ukuran Daerah / *Size* (X3)

Lampiran 6 : Data Penelitian Variabel Kontrol

Lampiran 7 : Hasil Olah Data SPSS

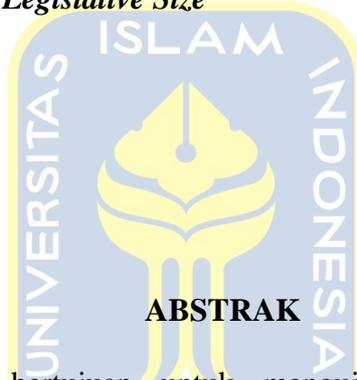
Lampiran 8 : Distribusi Nilai T Tabel



## ABSTRACT

*This study aims to empirically examine the effect of intergovernmental revenue, leverage, and size on the financial performance of local governments in Central Java for the 2018-2020 period with population and legislative size as control variables. The population used in this study is all local governments in Central Java which consists of 35 districts/cities. The number of samples used in this study were 57 samples. The sampling method used a purposive sampling method. Processing data in this study using SPSS and Ms Excel. The results of this study indicate that intergovernmental revenue partially does not affect the financial performance of local governments. Meanwhile, leverage has a negative effect on the financial performance of local governments, and size has a positive effect on the financial performance of local governments.*

**Keywords:** *Financial Performance, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size, Population, Legislative Size*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah periode 2018-2020 dengan jumlah penduduk dan jumlah anggota DPRD sebagai variabel kontrol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten/kota. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS dan Ms Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *Kinerja Keuangan, Intergovernmental Revenue, Leverage, Ukuran Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Anggota DPRD*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

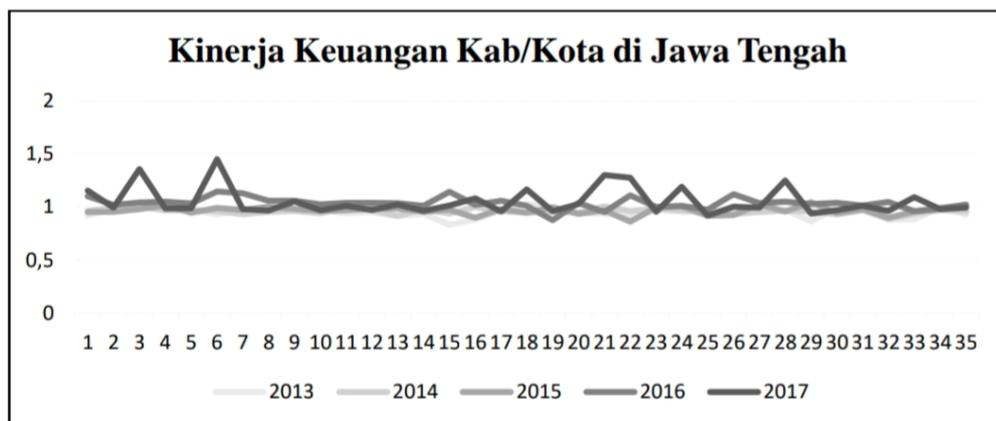
#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri untuk membangun dan mengembangkan daerah masing-masing sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif. Penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi penyebab keuangan daerah harus dikelola secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu ukuran untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dianalisis

dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), salah satunya yaitu rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Berikut kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017:

Gambar 1.1 Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017



Sumber: Data Keuangan Daerah (Direktorat EPIKD 2013-2017)

Gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota selama 5 tahun. Kinerja keuangan  $> 1$  menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak efisien. Sedangkan, kinerja keuangan  $< 1$  menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah efisien yang mana pengeluaran daerah lebih kecil dari pendapatan daerah. Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 5 tahun rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,99. Namun, pada tahun 2016 rata-rata kinerjanya sebesar 1,03 dan tahun 2017 sebesar 1,05 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak efisien.

Berdasarkan penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian Darmanto (2012) menunjukkan bahwa *leverage* dan *size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) mengungkapkan bahwa variabel ukuran daerah, *intergovernmental revenue*, dan fungsi pengawasan DPRD dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, penelitian Ilmiyyah et al. (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel *intergovernmental revenue*, klaster kemampuan keuangan daerah, *leverage*, opini audit, *size*, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Masdiantini dan Erawati (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *intergovernmental revenue* terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Natoen et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Putri dan Priyadi (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di muka, maka penelitian ini akan membahas pengaruh variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan teori agensi (*agency theory*) sebagai teori yang digunakan untuk pengembangan model

penelitian. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Dari beberapa perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya, khususnya variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*), maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini juga digunakan variabel kontrol.

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu jumlah penduduk dan jumlah anggota DPRD. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek yang digunakan. Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasan peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai subjek penelitian karena provinsi tersebut dalam 6 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2019 memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Intergovernmental Revenue,**

## **Leverage, dan Ukuran Daerah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kuantitatif ini yaitu:

1. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah ukuran daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademis dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan evaluasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam melihat dan memahami pembahasan dalam skripsi ini, penyajian skripsi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB II Kajian Pustaka ini berisi landasan teori, telaah penelitian terdahulu, dan paparan hipotesis penelitian.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III Metode Penelitian membahas mengenai metode pengumpulan data dan metode penelitian yang digunakan penulis.

#### **4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV berisi analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya.

#### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi pihak terkait.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori agensi (*agency theory*). Teori agensi disebut sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Siagian, 2011). Munculnya hubungan keagenan (agensi) dapat terjadi ketika *agent* yang dipekerjakan oleh satu atau lebih *principal* melakukan suatu jasa dan kemudian *principal* memberikan kepercayaan dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Mardiasmo (2018) menyatakan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mengungkapkan, menyajikan, melaporkan, dan memberikan pertanggungjawaban aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki wewenang dan berhak menerima pertanggungjawaban. Hal tersebut menunjukkan terjadinya hubungan agensi di antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat (*principal*) memiliki hak untuk mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (*agent*). Selain itu, teori agensi juga terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) di mana terdapat hubungan keagenan antara pemerintah pusat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah daerah akan berusaha

memberikan informasi mengenai kondisi daerahnya kepada pemerintah pusat selaku debitur. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya untuk memenuhi tuntutan debiturnya.

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pengelolaan keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan daerah melalui program kerja, kegiatan, maupun kebijaksanaan. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk dilakukan karena menjadi salah satu ukuran untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran kinerja keuangan dalam pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, di antaranya yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, maupun rasio pertumbuhan.

### **2.1.3 Intergovernmental Revenue**

*Intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). *Intergovernmental revenue* (dana perimbangan) merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah (*agent*) pada pemerintah pusat (*principal*) yang dicerminkan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* merupakan aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak dapat membiayai urusan daerahnya dengan modal sendiri (Ilmiyyah et al., 2017). Dalam pengambilan keputusan untuk pemberian kredit, kreditor dan calon kreditor melakukan perhitungan rasio leverage sehingga hal tersebut juga penting dilakukan pada pemerintah daerah.

#### **2.1.5 Ukuran Daerah (Size)**

Ukuran daerah merupakan variabel untuk menentukan besarnya suatu pemerintahan daerah dengan mengukur jumlah aset, jumlah karyawan, jumlah pendapatan, dan tingkat produktivitas suatu daerah. Pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat menghasilkan kualitas yang baik pada pelayanan publiknya di mana didukung oleh jumlah aset daerah (*size*). Jumlah aset yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menunjukkan besarnya ukuran daerah tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebelumnya juga telah dilakukan beberapa penelitian yang berhubungan erat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu antara lain:

1. Sesotyaningtyas (2012) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue*, *leverage*, pendapatan pajak daerah, dan ukuran legislatif berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa.
2. Sari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)” menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, PAD, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, *leverage* dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Masdiantini dan Erawati (2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan” di mana hasil

penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sedangkan variabel kemakmuran, *intergovernmental revenue* dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

4. Ilmiyyah et al. (2017) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015”. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan, secara parsial variabel opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Nugraheni dan Adi (2018) dengan judul penelitiannya yaitu “Faktor-Faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis” menunjukkan bahwa tingkat kekayaan (*wealth*), ukuran

pemerintah daerah (*size*), *leverage*, dan pendapatan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, temuan audit BPK berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Natoon et al. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)” menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (*population*), ukuran pemerintah daerah (*size*), dan tingkat kemakmuran (*wealth*) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7. Nurhayati dan Hamzah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder di mana populasi dari penelitian tersebut adalah kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2018. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara simultan dan

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

8. Sari dan Halmawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015-2018 dengan jumlah 12 kabupaten dan 7 kota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas periode pengamatan dan menambah variabel lain dalam penelitian.
9. Putri dan Priyadi (2021) dengan judul penelitiannya “Pengaruh *Leverage*, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” menyebutkan bahwa variabel *leverage* dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sesotyaningtyas (2012)	Independen: <i>intergovernmental revenue, leverage</i> , pendapatan pajak, ukuran legislatif  Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Terdapat pengaruh antara variabel <i>intergovernmental revenue, leverage</i> , pendapatan pajak, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa.
2.	Sari (2016)	Independen: ukuran pemerintah daerah, PAD, <i>leverage</i> , dana perimbangan, dan ukuran legislatif  Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengaruh antara variabel ukuran pemerintah daerah, PAD, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Tidak terdapat pengaruh antara <i>leverage</i> dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
3.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Independen: <i>intergovernmental revenue</i> , kemakmuran, opini audit BPK, temuan audit BPK, dan ukuran pemerintah daerah.  Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengaruh positif signifikan antara opini audit BPK dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</li> <li>• Tidak terdapat pengaruh <i>intergovernmental revenue</i>, variabel kemakmuran, dan temuan</li> </ul>

			audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
4.	Ilmiyyah et al. (2017)	<p>Independen: <i>intergovernmental revenue</i>, klaster kemampuan keuangan daerah, <i>leverage</i>, opini audit, <i>size</i>, dan ukuran legislatif.</p> <p>Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diukur dengan tingkat kemandirian daerah, terdapat pengaruh signifikan antara <i>intergovernmental revenue</i>, klaster kemampuan keuangan daerah, <i>leverage</i>, opini audit, <i>size</i>, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Secara parsial, tidak terdapat pengaruh antara klaster kemampuan keuangan daerah, <i>leverage</i>, opini audit, <i>size</i>, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Terdapat pengaruh negatif variabel <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
5.	Nugraheni dan Adi (2018)	<p>Independen: belanja modal, <i>leverage</i>, pendapatan pajak daerah, tingkat kekayaan daerah</p>	<p>Hasil penemuan tersebut menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i>, pendapatan pajak daerah, tingkat kekayaan daerah (<i>wealth</i>), dan ukuran</li> </ul>

		<p>(<i>wealth</i>), tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit, ukuran legislatif, dan ukuran pemerintah daerah.</p> <p>Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>pemerintah daerah (<i>size</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temuan audit BPK berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
6.	Natoen et al. (2019)	<p>Independen: jumlah penduduk (<i>population</i>), ukuran pemerintah daerah (<i>size</i>), tingkat kemakmuran (<i>wealth</i>), dan <i>intergovernmental revenue</i></p> <p>Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengaruh signifikan antara variabel <i>population</i> (jumlah penduduk), <i>size</i> (total aset daerah), dan <i>wealth</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>
7.	Nurhayati dan Hamzah (2020)	<p>Independen: pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah</p> <p>Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>Terdapat pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat.</p>
8.	Sari dan Halmawati (2021)	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD),</p>	<p>Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah</p>

		Dana Alokasi Umum (DAU), belanja daerah  Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	Putri dan Priyadi (2021)	Independen: <i>leverage</i> , dana perimbangan, belanja modal  Dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengaruh antara <i>leverage</i> dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Terdapat pengaruh positif signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>

### 2.3 Paparan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan tidak memerlukan pembayaran kembali. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. *Intergovernmental revenue* merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah (*agent*) pada pemerintah pusat (*principal*) yang dicerminkan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Hal tersebut menunjukkan keterkaitan

dengan teori agensi dalam penelitian ini. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan alokasi DAU pemerintah daerah akan dipantau oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat terpacu untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar *intergovernmental revenue* pada suatu daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Sesotyaningsih (2012) dan Ilmiyyah et al. (2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

$H_1$ : *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

*Leverage* merupakan besarnya pembiayaan aset daerah dengan utang karena urusan daerahnya tidak mampu dibiayai oleh daerah dengan modal sendiri (Ilmiyyah et al., 2017). Dalam pemerintah daerah, penting

bagi kreditor dan calon kreditor untuk melakukan perhitungan rasio leverage dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi mengenai hubungan keagenan antara pemerintah pusat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Menurut Darmanto (2012), *leverage* yang merupakan faktor finansial memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat *leverage* yang semakin tinggi dapat memicu pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditor untuk menjamin pengembalian dana, hal tersebut kemudian akan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja keuangannya.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian oleh Sesotyaningsih (2012) dan Ilmiyyah et al. (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

$H_2$ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3. Pengaruh ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

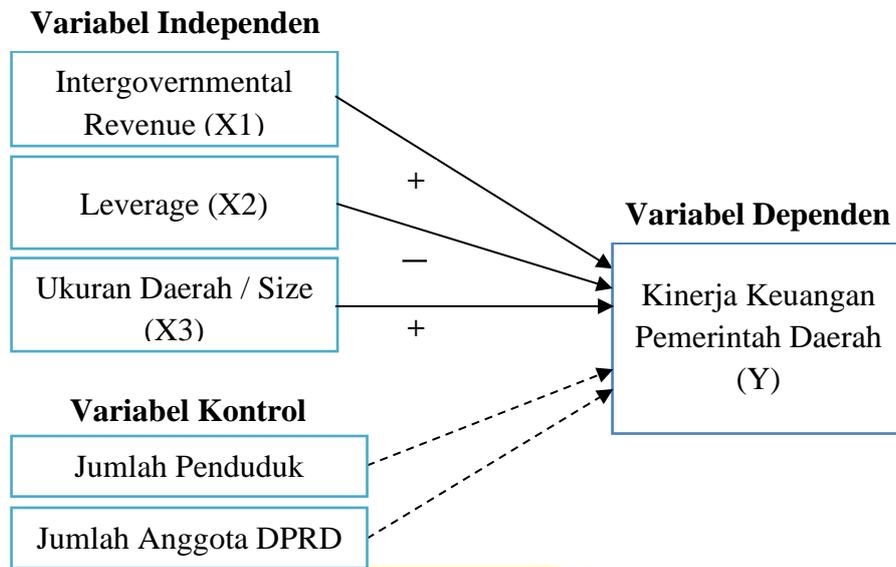
Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu variabel besar kecilnya pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah karyawan, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik di mana didukung oleh jumlah aset daerah (*size*). Besarnya

ukuran daerah dapat ditunjukkan dengan jumlah aset daerah tersebut. Jika ukuran daerah (*size*) atau total aset yang dimiliki suatu daerah besar maka pelaksanaan kegiatan operasional daerah tersebut dapat lebih mudah. Sehingga, masyarakat (*principal*) dapat menerima pelayanan secara optimal dari pemerintah daerah (*agent*) di mana hal tersebut juga sesuai dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, semakin besar ukuran daerah (*size*) tuntutan terhadap pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik juga dapat semakin besar. Semakin besar ukuran pemerintah daerah (total aset) maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

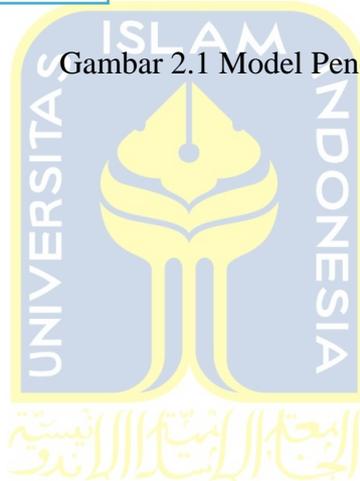
Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Masdiantini dan Erawati (2016), Ilmiyyah et al. (2017), Natoen et al. (2019), serta Nurhayati dan Hamzah (2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

$H_3$ : Ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari paparan di atas, gambaran kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Alasan peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai subjek penelitian karena provinsi tersebut dalam 6 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2019 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio kemandirian keuangan daerah memiliki kinerja keuangan yang baik (Badriyah, 2021), sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. Rentang waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 karena merupakan tahun pelaporan keuangan terbaru sehingga diharapkan dapat menghasilkan keluaran penelitian yang sesuai dengan kondisi terkini yang terjadi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti (Sekaran & Bougie, 2013). Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki *website* dan/atau informasi publik yang dapat diakses pada periode 2018-2020.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempublikasikan dan menyediakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara lengkap untuk tahun 2018-2020.

Dari populasi dengan total 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sampel yang terpilih adalah sebanyak 19 kabupaten/kota periode 2018-2020. Sehingga, terdapat 57 unit analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

### **3.2 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa data keuangan dan non keuangan yang diperoleh melalui publikasi dari *website* resmi masing-masing kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data juga dapat diperoleh melalui publikasi *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Sumber data lain yang digunakan adalah data statistik yang dapat diperoleh melalui publikasi *website* Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### 3.3 Definisi Dan Pengukuran Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

#### 3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (X). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menilai efisiensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Perhitungan rasio efisiensi yang digunakan untuk menentukan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Penerimaan}}$$

#### 3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (X) merupakan variabel yang berpengaruh dan dapat memengaruhi variabel dependen (Y). Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*). Rasio variabel *intergovernmental revenue* ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Indikator untuk menentukan rasio variabel *leverage* pada penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu dengan

membandingkan total utang dengan total ekuitas yang tersaji dalam laporan neraca pemerintah daerah. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan modal daerah sendiri dalam mendanai kebutuhan pemerintahan dibandingkan dengan utang pemerintah daerah dari pihak eksternal. DER dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sedangkan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan rasio ukuran daerah (*size*) adalah Ln total aset daerah.

### 3.3.3 Variabel Kontrol

Menurut Sugiyono (2017), variabel kontrol merupakan suatu variabel yang dibuat konstan atau dikendalikan sehingga faktor luar yang tidak diteliti tidak dapat memengaruhi variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk dan jumlah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

### 3.4 Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan metode regresi linear berganda. Metode analisis tersebut digunakan untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### 3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dari data sampel penelitian yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini, analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji dan mengetahui kelayakan data dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan dari pengujian ini untuk memastikan data pada penelitian ini terdistribusikan secara normal di mana bebas dari autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

#### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2018), model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dalam aplikasi SPSS. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas (*sig*) > 0,05, sedangkan jika nilai probabilitas (*sig*) < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

### 3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Apabila nilai probabilitas (*sig*) > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika nilai probabilitas (*sig*) < 0,05 maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas.

### 3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi di antara variabel bebasnya. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui SPSS. Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terdapat multikolinearitas, namun apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas pada model tersebut.

### 3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sudiro (2012), analisis regresi linear berganda merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah

a = konstanta

$b_1$  = koefisien variabel *intergovernmental revenue*

$b_2$  = koefisien variabel *leverage*

$b_3$  = koefisien variabel ukuran daerah (*size*)

$b_4$  = koefisien variabel kontrol jumlah penduduk

$b_5$  = koefisien variabel kontrol jumlah anggota DPRD

$X_1$  = *intergovernmental revenue*

$X_2$  = *leverage*

$X_3$  = ukuran daerah (*size*)

$X_4$  = variabel kontrol jumlah penduduk

$X_5$  = variabel kontrol jumlah anggota DPRD

e = *error*

### **3.4.4 Uji Hipotesis**

#### **3.4.4.1 Uji Statistik T (T-test)**

Ghozali (2018) mengatakan bahwa penggunaan uji statistik t bertujuan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian pada penelitian ini sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Apabila nilai signifikansi t statistik  $< 0,05$  maka suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai signifikansi t statistik  $> 0,05$  maka berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t juga dapat dilihat pada nilai t hitung. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. Sedangkan, apabila t hitung kurang dari t tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

#### **3.4.4.2 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen (terikat). Apabila koefisien determinasi semakin besar (mendekati 1) maka menunjukkan pengaruh variabel bebas (X) yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya,

apabila koefisien determinasi semakin kecil (mendekati 0) maka pengaruh variabel bebas (X) kecil terhadap variabel terikat (Y).



## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang berguna untuk memberikan gambaran dari data sampel penelitian yang telah dikumpulkan. Berikut hasil analisis deskriptif pada penelitian ini di mana menampilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	57	.000	.182	.07271	.042049
<i>Intergovernmental Revenue</i>	57	.369	.544	.44085	.030596
<i>Leverage</i>	57	.002	.024	.00872	.005193
<i>Size</i>	57	28.505	29.522	28.9949	.281092
Jumlah Penduduk	57	12.425	14.408	13.8188	.397112
Jumlah Anggota DPRD	57	30.000	50.000	47.0175	4.711275

*Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)*

Berdasarkan uji analisis deskriptif yang tercantum pada tabel 4.1 diperoleh hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 0,182. Dengan total 57 sampel, variabel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,073 dan standar deviasi sebesar 0,042.
2. Variabel *intergovernmental revenue* (X1) nilai minimumnya adalah 0,369 dan nilai maksimumnya 0,544. Dengan total 57 sampel, variabel

*intergovernmental revenue* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,441 dan standar deviasi sebesar 0,031.

3. Variabel *leverage* (X2) memiliki nilai minimum 0,002 dan nilai maksimum 0,024. Dengan total 57 sampel, variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,009 dan standar deviasi sebesar 0,005.
4. Variabel *size* / ukuran daerah (X3) memiliki nilai minimum 28,505 dan nilai maksimum 29,522. Dengan total 57 sampel, variabel ukuran daerah (*size*) memiliki nilai rata-rata (*mean*) 28,995 dan standar deviasi 0,281.
5. Variabel kontrol jumlah penduduk memiliki nilai minimum 12,425 dan nilai maksimum 14,408. Dengan total 57 sampel, variabel jumlah penduduk memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,819 dan standar deviasi sebesar 0,397.
6. Variabel kontrol jumlah anggota DPRD memiliki nilai minimum 30 dan nilai maksimum 50. Dengan total 57 sampel, variabel jumlah anggota DPRD memiliki nilai rata-rata (*mean*) 47,018 dan standar deviasi 4,711.

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji statistik yang bertujuan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
n	57
Sig.	.301

*Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)*

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,301. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih dari 0,05 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Data penelitian yang baik yaitu data yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji Glejser, di mana apabila nilai sig. lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai sig. kurang dari 0,05 maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser:

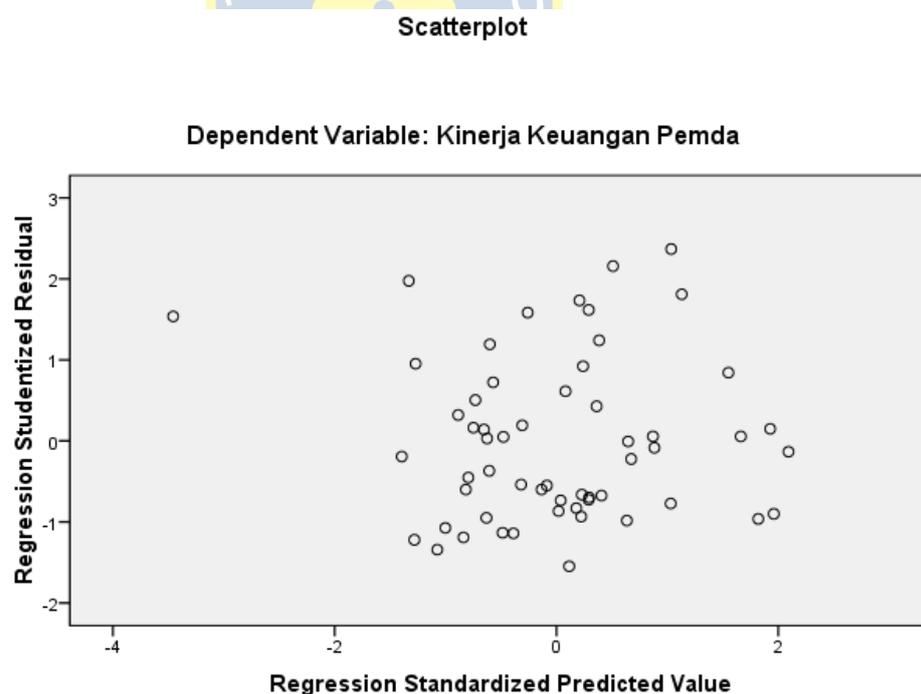
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>
<i>Intergovernmental Revenue (X1)</i>	.510
<i>Leverage (X2)</i>	.860
<i>Size (X3)</i>	.764
Jumlah Penduduk (K1)	.087
Jumlah Anggota DPRD (K2)	.158

*Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat jika nilai signifikan variabel *intergovernmental revenue* (X1) sebesar 0,510, variabel *leverage* (X2) sebesar 0,860, variabel *size* / ukuran daerah (X3) sebesar 0,764, variabel kontrol jumlah penduduk sebesar 0,087, dan variabel kontrol jumlah anggota DPRD sebesar 0,158. Nilai signifikan untuk setiap variabel, baik variabel independen maupun variabel kontrol melebihi 0,05. Sehingga, dihasilkan kesimpulan bahwa pada data penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut juga didukung dengan persebaran data pada grafik Scatterplot yang menyebar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



*Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)*

### 4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi di antara variabel independennya. Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi di antara variabel bebasnya. Data yang baik yaitu data yang tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas ditentukan dengan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terdapat multikolinearitas, namun apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas. Berikut hasil pengolahan data uji multikolinearitas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X1)	.631	1.586
<i>Leverage</i> (X2)	.636	1.572
<i>Size</i> (X3)	.439	2.278
Jumlah Penduduk (K1)	.140	7.135
Jumlah Anggota DPRD (K2)	.120	8.321

Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel independen dan variabel kontrol yaitu variabel *intergovernmental revenue* (X1), variabel *leverage* (X2), variabel *size* / ukuran daerah (X3), variabel jumlah penduduk (K1), dan variabel jumlah anggota DPRD (K2) lebih dari 0,1. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) setiap variabel tersebut kurang dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen maupun variabel kontrol dalam penelitian ini.

### 4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size* / ukuran daerah, variabel jumlah penduduk, dan variabel jumlah anggota DPRD terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah). Regresi linear berganda dapat diketahui dari hasil uji berikut:

Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
(Constant)	-2.852	-3.387	.001
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X1)	.274	1.343	.185
<i>Leverage</i> (X2)	-2.934	-2.454	.018
<i>Size</i> (X3)	.073	2.740	.008
Jumlah Penduduk (K1)	.089	2.665	.010
Jumlah Anggota DPRD (K2)	-.011	-3.575	.001

Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.5, maka persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -2,852 + 0,274X_1 - 2,934X_2 + 0,073X_3 + 0,089K_1 - 0,011K_2$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai a sebesar -2,852 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kinerja keuangan pemerintah daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel *intergovernmental revenue* (X1), *leverage* (X2), ukuran daerah / *size* (X3), jumlah penduduk, dan jumlah anggota DPRD.

Ketika variabel independen bernilai nol, maka nilai tetap atau nilai awal variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan bernilai -2,852. Jika tidak terdapat variabel independen maupun variabel kontrol, maka variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) tidak mengalami perubahan.

2. Nilai koefisien regresi  $X_1$  ( $b_1X_1$ ) sebesar 0,274 menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai tersebut berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel *intergovernmental revenue* dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau 0 akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,274.
3. Nilai koefisien regresi  $X_2$  ( $b_2X_2$ ) sebesar -2,934 menunjukkan bahwa dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau 0, setiap kenaikan 1 satuan variabel *leverage* akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 2,934.
4. Nilai koefisien regresi  $X_3$  ( $b_3X_3$ ) sebesar 0,073 menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah (*size*) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai tersebut berarti bahwa dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau 0, setiap kenaikan 1 satuan variabel ukuran daerah (*size*) akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,073.
5. Nilai koefisien regresi  $K_1$  ( $b_4X_4$ ) sebesar 0,089 menunjukkan bahwa variabel kontrol jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai tersebut berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel jumlah penduduk akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,089, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau 0.

6. Nilai koefisien regresi  $K_2$  ( $b_5X_5$ ) sebesar -0,011 menunjukkan bahwa dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau 0, setiap kenaikan 1 satuan variabel jumlah anggota DPRD akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,011.

#### 4.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Statistik T (T-test)

Uji statistik t (*T-test*) digunakan untuk melihat secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik t dapat diketahui melalui nilai signifikansi t statistik. Apabila nilai signifikansi t statistik  $< 0,05$  maka suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Selain itu, dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t juga dapat dilihat pada nilai t hitung. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 57 ( $n = 57$ ),  $k = 5$ , serta  $\alpha = 5\%$ . Sehingga, berdasarkan tabel distribusi nilai t tabel, nilai t tabel pada penelitian ini sebesar 2,008.

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji statistik t (*T-test*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *intergovernmental revenue* (X1) memiliki nilai signifikan 0,185 dan nilai t hitung 1,343. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai t hitung < t tabel. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan hipotesis pertama ( $H_1$ ) tidak didukung.
2. Variabel *leverage* (X2) memiliki nilai signifikan 0,018 dan nilai t hitung -2,454. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan jika variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan hipotesis kedua ( $H_2$ ) didukung.
3. Variabel *size* / ukuran daerah (X3) memiliki nilai signifikan 0,008 dan nilai t hitung 2,740. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Sehingga, disimpulkan jika variabel ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) didukung.

#### 4.4.2 Koefisien Determinasi

Pada penelitian ini, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R square</b>
.541	.293	.224

Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,224. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) sebesar 0,224 atau 22,4%. Sedangkan, sebesar 0,776 atau 77,6% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

#### 4.5 Pembahasan

##### 1. Pengaruh Intergovernmental Revenue (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pada penelitian ini, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Sehingga, diperoleh kesimpulan hipotesis pertama ( $H_1$ ) tidak didukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) dan Natoen et al. (2019) yang menyatakan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil pada penelitian berlawanan dengan penelitian Sesotyaningtyas (2012) dan Ilmiyyah et al. (2017) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi di mana pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. *Intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan dana transfer tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan daerahnya. Dalam penelitian ini, tidak terdapat pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat sehingga dorongan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya masih kurang. Selain itu, hal tersebut juga dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah belum menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat secara optimal, terutama untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini dapat diketahui

dari jumlah belanja pegawai yang tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik pemerintah daerah. Disisi lain, dana yang diperoleh dari pemerintah pusat bukan merupakan dana rutin melainkan dana tambahan yang diberikan berdasarkan kekurangan dana pemerintah daerah untuk membiayai kelebihan belanja daerah, sehingga daerah akan lebih mengutamakan menggunakan hasil pendapatan daerahnya sendiri yang berarti dana transfer tersebut tidak merepresentasikan kinerja pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Leverage (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan hipotesis kedua ( $H_2$ ), hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, diperoleh kesimpulan hipotesis kedua ( $H_2$ ) didukung.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Darmanto (2012) serta Nugraheni dan Adi (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Sesotyaningtyas (2012), Sari (2016), Ilmiyyah et al. (2017), serta Putri dan Priyadi (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi di mana pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah pusat (debitur) membutuhkan informasi mengenai kondisi pemerintah daerah terkait dengan kredit yang akan diberikan. Sehingga, pemerintah daerah dengan pinjaman besar akan berupaya memperbaiki kinerja keuangan daerahnya karena pengawasan kreditur akan semakin tinggi untuk menilai apakah daerah dapat melunasi pinjaman yang diberikan. Selain itu, hal tersebut juga dapat membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan supaya kinerja keuangannya tidak menurun. *Leverage* merupakan proporsi pendanaan daerah yang dibiayai dengan utang. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, besarnya nilai *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat berusaha untuk menurunkan tingkat *leverage* agar dapat memberikan kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat meningkatkan pengawasan kepada pemerintah daerah agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat.

### **3. Pengaruh Ukuran Daerah / Size (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan hipotesis kedua ( $H_3$ ), hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa ukuran

daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini didukung.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) serta Nugraheni dan Adi (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian terdahulu yang berlawanan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian Ilmiyyah et al. (2017) yang menjelaskan bahwa ukuran daerah (*size*) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran daerah (*size*) dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah aset. Apabila jumlah aset suatu daerah semakin besar, maka ukuran daerah (*size*) juga semakin besar. Begitu sebaliknya, apabila semakin kecil jumlah aset suatu daerah, maka ukuran daerahnya juga semakin kecil. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena jika jumlah aset yang dimiliki oleh suatu daerah besar, maka pemanfaatan aset yang dimiliki akan lebih optimal dan dapat menambah peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan besarnya total aset memengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa total aset pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah berperan sebagaimana mestinya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Sehingga,

pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan aset yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dengan memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi di mana masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Pemerintah daerah dengan ukuran daerah yang besar memiliki kewajiban lebih untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dengan semakin besarnya ukuran daerah yang dimiliki, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi lebih besar sehingga pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **4. Pengaruh Jumlah Penduduk (K1) sebagai Variabel Kontrol terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,01 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,665. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmanto (2012) yang menyatakan bahwa *population* (jumlah penduduk) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk dapat menuntut

pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, sehingga pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk selalu meningkatkan tanggungjawab dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat agar kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi di mana masyarakat/penduduk sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah karena semakin besar jumlah penduduk, tuntutan yang diterima pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya akan semakin besar sehingga dapat mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **5. Pengaruh Jumlah Anggota DPRD (K2) sebagai Variabel Kontrol terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel jumlah anggota DPRD memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel dengan koefisien bernilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD (ukuran legislatif) sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPRD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Penelitian

terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) dan Noviyanti dan Kiswanto (2016) yang menyebutkan bahwa ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Seharusnya, anggota DPRD dapat lebih aktif dalam meningkatkan kinerjanya. Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran legislatif sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi di mana masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Masyarakat mempunyai hak untuk mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai *agent* yang memiliki akses dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dituntut untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan meningkatkan kinerja keuangannya.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *intergovernmental revenue*, *leverage*, dan ukuran daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti nilai *intergovernmental revenue* pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah belum dapat dikatakan sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti besarnya nilai *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin rendah nilai *leverage* maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat lebih baik.
3. Ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti besarnya total aset pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah memengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

### 1) Saran Akademik

Berikut saran yang diberikan penulis kepada peneliti selanjutnya:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain di luar variabel independen maupun variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini, seperti opini audit, temuan audit. Pada hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,159. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini memberikan pengaruh variabel dependen sebesar 15,9%. Sedangkan, sebesar 0,841 atau 84,1% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan variabel kontrol lain yang tidak digunakan dalam variabel penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian dengan lebih banyak jumlah sampel yang digunakan agar penelitian lebih bervariasi dan lebih representatif dalam mewakili populasi.

### 2) Saran Praktis

Berikut saran yang diberikan penulis kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah:

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini, terdapat pengaruh positif ukuran pemerintah daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan, sehingga pemerintah daerah

diharapkan dapat selalu mempertahankan dan meningkatkan jumlah aset daerah agar dapat memberikan dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

2. Pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mendukung dan mengawasi pemerintah daerah agar dapat membantu dan memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya.
3. Masyarakat diharapkan untuk dapat membantu mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sehingga anggota DPRD dapat tetap aktif dan tidak lengah dalam memberikan pertanggungjawaban dan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). Pengaruh karakteristik pemda dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemda kabupaten di Pulau Sumba. *JAFFA*, 1-17.
- Badriyah, S. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi jawa tengah tahun 2014 - 2019. *Skripsi*.
- Darmanto, H. C. (2012). Pengaruh population, employment, size dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan di pemerintahan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1643-1655.
- Ilmiyyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 147-162.
- Jateng, D. K. (2017). *Website kab/kota*. Diambil kembali dari Portal resmi Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/website-kab-kota/>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, Volume 3 (1).
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150-1182.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Studi empiris pada pemerintah daerah

- kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 106-117.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1-10.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2018). Faktor-Faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Simposium Nasional Akuntansi XXI*, 1-40.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 22-34.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. (2014). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia.
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-16.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-11.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 679-692.
- Sekaran, & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley@ Sons.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1-6.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 154-170.
- Siagian, S. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-13.
- Sudiro, A. (2012). *Modul 6 Metodologi Penelitian Bisnis*.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.



## LAMPIRAN 1

### Daftar Sampel

No.	Nama Kabupaten / Kota
1.	Kabupaten Banjarnegara
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Blora
4.	Kabupaten Boyolali
5.	Kabupaten Brebes
6.	Kabupaten Demak
7.	Kabupaten Karanganyar
8.	Kabupaten Kebumen
9.	Kabupaten Kendal
10.	Kabupaten Kudus
11.	Kabupaten Pati
12.	Kabupaten Pemasang
13.	Kabupaten Purbalingga
14.	Kabupaten Purworejo
15.	Kabupaten Wonogiri
16.	Kabupaten Wonosobo
17.	Kabupaten Magelang
18.	Kabupaten Semarang
19.	Kota Tegal

## LAMPIRAN 2

### Data Penelitian Variabel Dependen (Y)

#### 1. Data Realisasi Pengeluaran

No.	Kabupaten / Kota	Realisasi Pengeluaran		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	10,949,900,000	11,750,000,000	10,900,000,000
2.	Kab. Banyumas	44,959,920,000	25,016,000,000	29,519,500,000
3.	Kab. Blora	4,000,000,000	5,499,500,000	4,515,000,000
4.	Kab. Boyolali	8,878,000,000	28,436,000,000	17,733,716,000
5.	Kab. Brebes	15,388,000,000	10,500,000,000	15,500,000,000
6.	Kab. Demak	17,467,399,346	27,500,000,000	28,012,188,080
7.	Kab. Karanganyar	15,000,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000
8.	Kab. Kebumen	11,750,000,000	9,470,000,000	9,550,000,000
9.	Kab. Kendal	12,500,000,000	11,500,000,000	6,000,000,000
10.	Kab. Kudus	8,000,000,000	7,500,000,000	4,140,000,000
11.	Kab. Pati	39,103,000,000	20,356,000,000	22,613,000,000
12.	Kab. Pemasang	22,176,000,000	15,860,000,000	8,000,000,000
13.	Kab. Purbalingga	12,878,251,000	9,086,000,000	8,300,000,000
14.	Kab. Purworejo	0	8,600,000,000	0
15.	Kab. Wonogiri	7,635,000,000	3,000,000,000	2,500,000,000
16.	Kab. Wonosobo	11,500,000,000	41,119,419,454	16,363,000,000
17.	Kab. Magelang	25,755,000,000	10,204,000,000	7,204,000,000
18.	Kab. Semarang	5,000,000,000	4,383,012,004	6,783,011,996
19.	Kota Tegal	11,320,000,000	11,990,000,000	13,733,000,000

#### 2. Data Realisasi Penerimaan

No.	Kabupaten / Kota	Realisasi Penerimaan		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	172,299,944,038.00	116,951,143,340.00	88,211,343,324.00
2.	Kab. Banyumas	388,439,356,857.40	290,345,329,675.23	242,705,123,481.00
3.	Kab. Blora	63,608,030,710.00	63,922,107,092.00	97,896,191,370.00
4.	Kab. Boyolali	119,976,862,486.80	156,494,100,105.00	108,946,985,388.00
5.	Kab. Brebes	164,969,686,656.07	212,061,563,928.38	177,760,688,992.00
6.	Kab. Demak	124,565,321,092.00	200,338,526,291.00	225,045,191,625.55
7.	Kab. Karanganyar	187,137,756,959.00	290,053,215,647.00	166,987,611,000.00
8.	Kab. Kebumen	225,675,495,480.60	203,192,379,502.50	204,132,918,416.18
9.	Kab. Kendal	234,877,915,025.00	212,488,849,034.00	97,695,464,753.00
10.	Kab. Kudus	138,850,753,150.00	169,651,140,940.00	190,885,036,079.00
11.	Kab. Pati	283,680,769,290.00	252,593,286,061.00	200,983,310,468.00
12.	Kab. Pemasang	230,602,904,973.00	312,200,341,726.00	347,906,316,058.00
13.	Kab. Purbalingga	114,486,229,758.00	125,149,497,291.00	130,001,861,009.00
14.	Kab. Purworejo	183,208,287,348.00	110,292,510,922.00	107,891,455,687.83
15.	Kab. Wonogiri	197,633,100,739.00	243,265,472,884.72	226,964,677,156.00
16.	Kab. Wonosobo	271,566,173,121.00	255,457,766,622.00	173,138,414,810.00
17.	Kab. Magelang	432,441,998,635.00	222,184,974,911.00	218,814,092,659.00
18.	Kab. Semarang	240,489,393,862.11	181,106,149,672.11	175,630,364,280.11
19.	Kota Tegal	106,373,126,488.05	165,508,163,967.77	239,729,868,598.75

3. Hasil Perhitungan Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
(Rasio Efisiensi)

No.	Kabupaten / Kota	Rasio Efisiensi		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	0.06355	0.10047	0.12357
2.	Kab. Banyumas	0.11575	0.08616	0.12163
3.	Kab. Blora	0.06289	0.08603	0.04612
4.	Kab. Boyolali	0.07400	0.18171	0.16277
5.	Kab. Brebes	0.09328	0.04951	0.08720
6.	Kab. Demak	0.14023	0.13727	0.12447
7.	Kab. Karanganyar	0.08015	0.03448	0.08983
8.	Kab. Kebumen	0.05207	0.04661	0.04678
9.	Kab. Kendal	0.05322	0.05412	0.06142
10.	Kab. Kudus	0.05762	0.04421	0.02169
11.	Kab. Pati	0.13784	0.08059	0.11251
12.	Kab. Pemasang	0.09617	0.05080	0.02299
13.	Kab. Purbalingga	0.11249	0.07260	0.06385
14.	Kab. Purworejo	0	0.07797	0
15.	Kab. Wonogiri	0.03863	0.01233	0.01101
16.	Kab. Wonosobo	0.04235	0.16096	0.09451
17.	Kab. Magelang	0.05956	0.04593	0.03292
18.	Kab. Semarang	0.02079	0.02420	0.03862
19.	Kota Tegal	0.10642	0.07244	0.05729

Sumber: Hasil olah data Ms Excel (2022)

### LAMPIRAN 3

#### Data Penelitian Variabel *Intergovernmental Revenue* (X1)

##### 1. Data Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Kabupaten / Kota	DAU		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	959,486,489,000	999,003,344,000	900,564,784,000
2.	Kab. Banyumas	1,373,971,809,000	1,437,036,239,000	1,306,921,916,000
3.	Kab. Blora	926,682,649,031	966,559,787,000	871,294,279,000
4.	Kab. Boyolali	1,144,494,182,000	1,045,669,922,000	956,428,556,000
5.	Kab. Brebes	1,101,387,179,000	1,373,396,371,000	934,338,029,000
6.	Kab. Demak	894,376,873,000	946,467,336,000	860,873,465,000
7.	Kab. Karanganyar	978,664,650,000	1,018,544,740,000	984,914,973,687
8.	Kab. Kebumen	1,234,003,169,000	1,279,681,428,000	1,197,504,293,000
9.	Kab. Kendal	956,331,079,388	998,236,127,000	909,781,219,000
10.	Kab. Kudus	807,056,990,772	851,036,584,000	757,097,370,000
11.	Kab. Pati	1,189,796,870,000	1,240,426,635,000	1,115,340,333,000
12.	Kab. Pemasang	1,180,834,332,000	1,223,060,205,000	1,118,791,154,000
13.	Kab. Purbalingga	881,574,483,000	918,228,685,000	841,051,988,000
14.	Kab. Purworejo	924,251,795,000	963,312,191,000	930,205,439,000
15.	Kab. Wonogiri	1,124,733,467,000	1,181,037,066,000	1,074,092,865,000
16.	Kab. Wonosobo	827,791,657,000	877,474,203,000	799,113,605,000
17.	Kab. Magelang	1,060,540,612,000	1,097,366,974,000	987,675,947,000
18.	Kab. Semarang	952,362,147,000	1,001,565,375,000	909,555,622,000
19.	Kota Tegal	482,150,715,000	502,969,026,000	458,758,336,000

##### 2. Data Total Pendapatan

No.	Kabupaten / Kota	Total Pendapatan		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	2,074,653,161,695.00	2,105,990,272,337.00	1,994,604,106,561.00
2.	Kab. Banyumas	3,265,926,651,860.83	3,434,925,995,303.17	3,330,186,788,242.00
3.	Kab. Blora	2,120,671,434,967.00	2,240,970,020,181.00	2,127,946,961,535.00
4.	Kab. Boyolali	2,524,365,919,814.62	2,357,487,210,573.00	2,382,403,220,150.00
5.	Kab. Brebes	2,025,507,400,197.00	3,096,826,845,150.05	2,315,260,399,485.00
6.	Kab. Demak	2,143,306,258,595.00	2,362,016,248,792.55	2,333,738,996,798.95
7.	Kab. Karanganyar	2,113,929,231,663.00	2,179,409,706,710.00	2,255,843,022,157.00
8.	Kab. Kebumen	2,639,814,864,397.90	2,818,494,983,540.68	2,763,229,307,229.80
9.	Kab. Kendal	2,138,564,387,700.00	2,228,384,399,855.00	2,131,449,784,048.00
10.	Kab. Kudus	1,996,530,094,357.00	2,090,430,364,413.00	2,016,176,986,239.00
11.	Kab. Pati	2,789,055,859,854.00	2,838,881,396,181.00	2,662,375,437,006.00
12.	Kab. Pemasang	2,428,263,885,703.00	2,636,036,843,851.00	2,449,008,577,285.00
13.	Kab. Purbalingga	1,948,442,029,100.00	2,076,658,014,142.00	1,952,749,301,274.00
14.	Kab. Purworejo	2,049,784,186,054.00	2,172,436,925,113.65	2,166,947,747,648.00
15.	Kab. Wonogiri	2,298,176,600,990.00	2,442,677,972,827.15	2,273,678,538,635.00
16.	Kab. Wonosobo	1,851,441,024,405.00	1,958,595,025,572.00	1,878,995,666,418.00
17.	Kab. Magelang	2,302,190,543,616.00	2,575,439,825,755.00	2,380,457,680,604.00
18.	Kab. Semarang	2,117,416,566,803.60	2,311,149,343,922.00	2,211,273,524,265.97
19.	Kota Tegal	987,244,236,619.41	1,036,963,763,529.16	1,017,915,109,373.00

3. Hasil Perhitungan *Intergovernmental Revenue* (X1)

No.	Kabupaten / Kota	Intergovernmental Revenue		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	0.46248	0.47436	0.45150
2.	Kab. Banyumas	0.42070	0.41836	0.39245
3.	Kab. Blora	0.43698	0.43131	0.40945
4.	Kab. Boyolali	0.45338	0.44355	0.40146
5.	Kab. Brebes	0.54376	0.44349	0.40356
6.	Kab. Demak	0.41729	0.40070	0.36888
7.	Kab. Karanganyar	0.46296	0.46735	0.43661
8.	Kab. Kebumen	0.46746	0.45403	0.43337
9.	Kab. Kendal	0.44718	0.44796	0.42684
10.	Kab. Kudus	0.40423	0.40711	0.37551
11.	Kab. Pati	0.42659	0.43694	0.41893
12.	Kab. Pemasang	0.48629	0.46398	0.45683
13.	Kab. Purbalingga	0.45245	0.44217	0.43070
14.	Kab. Purworejo	0.45090	0.44342	0.42927
15.	Kab. Wonogiri	0.48940	0.48350	0.47240
16.	Kab. Wonosobo	0.44711	0.44801	0.42529
17.	Kab. Magelang	0.46067	0.42609	0.41491
18.	Kab. Semarang	0.44978	0.43336	0.41133
19.	Kota Tegal	0.48838	0.48504	0.45068

Sumber: Hasil olah data Ms Excel (2022)

## LAMPIRAN 4

### Data Penelitian Variabel *Leverage* (X2)

#### 1. Data Total Utang

No.	Kabupaten / Kota	Total Utang		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	14,847,764,458.00	27,892,413,417.11	21,558,235,704.63
2.	Kab. Banyumas	47,584,450,428.00	48,022,508,588.25	53,745,484,966.00
3.	Kab. Blora	26,045,021,906.93	38,147,273,422.93	27,802,849,357.11
4.	Kab. Boyolali	32,495,011,851.00	25,922,007,639.76	31,048,552,796.16
5.	Kab. Brebes	61,148,270,093.55	76,124,611,932.77	48,248,863,904.88
6.	Kab. Demak	23,193,060,087.99	23,882,389,929.67	16,183,319,247.23
7.	Kab. Karanganyar	12,567,654,586.42	77,487,001,680.71	48,907,644,897.19
8.	Kab. Kebumen	19,470,388,884.17	28,013,032,839.83	41,790,047,964.00
9.	Kab. Kendal	22,583,391,149.00	23,132,800,671.64	48,079,491,470.46
10.	Kab. Kudus	26,884,809,344.96	45,694,093,284.08	39,526,372,676.88
11.	Kab. Pati	15,271,698,380.00	15,930,310,780.00	17,505,067,742.00
12.	Kab. Pemasang	22,565,455,287.92	28,676,839,510.23	49,127,692,771.69
13.	Kab. Purbalingga	39,259,348,356.60	24,342,556,131.21	40,807,147,812.38
14.	Kab. Purworejo	22,869,355,629.92	27,985,586,663.14	29,886,080,519.47
15.	Kab. Wonogiri	82,106,190,017.89	25,954,565,055.00	29,383,744,143.83
16.	Kab. Wonosobo	9,985,534,071.00	7,169,175,220.89	7,161,159,732.89
17.	Kab. Magelang	19,717,148,141.04	13,672,463,777.19	21,102,659,627.22
18.	Kab. Semarang	27,090,182,656.32	36,708,575,198.21	39,346,280,871.65
19.	Kota Tegal	46,855,414,772.64	32,689,665,441.00	44,143,784,410.00

#### 2. Data Total Ekuitas

No.	Kabupaten / Kota	Total Ekuitas		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	4,340,903,455,967.70	4,441,478,434,455.95	4,507,361,489,270.99
2.	Kab. Banyumas	6,372,280,602,025.72	6,178,629,906,924.43	6,486,770,354,066.71
3.	Kab. Blora	2,890,809,211,391.59	3,324,415,623,450.68	3,355,098,974,795.45
4.	Kab. Boyolali	3,151,695,467,737.44	3,744,222,069,562.68	4,196,642,436,938.79
5.	Kab. Brebes	3,305,735,160,009.52	4,111,337,984,341.77	6,578,629,184,619.62
6.	Kab. Demak	5,061,454,436,763.60	5,426,590,811,260.58	5,680,937,398,810.17
7.	Kab. Karanganyar	3,178,363,383,566.41	3,399,455,968,693.98	6,083,348,460,367.83
8.	Kab. Kebumen	4,529,217,894,028.92	4,454,310,805,714.17	4,483,948,124,718.03
9.	Kab. Kendal	3,058,685,106,692.06	3,003,776,054,685.44	3,082,700,128,174.38
10.	Kab. Kudus	4,132,328,604,597.53	4,422,837,186,760.54	4,630,969,928,737.96
11.	Kab. Pati	6,175,651,450,903.96	6,423,824,305,199.58	6,237,392,567,924.18
12.	Kab. Pemasang	3,489,947,330,293.93	3,758,250,216,900.69	3,753,873,858,568.38
13.	Kab. Purbalingga	2,582,656,394,841.50	2,821,986,130,961.66	2,840,882,249,091.68
14.	Kab. Purworejo	2,750,090,944,301.53	2,959,245,933,385.05	3,078,571,850,213.42
15.	Kab. Wonogiri	3,359,790,975,773.87	3,714,421,688,975.79	3,791,685,551,049.84
16.	Kab. Wonosobo	3,060,071,808,499.34	3,383,362,181,357.15	3,604,318,772,565.15
17.	Kab. Magelang	3,122,043,629,677.49	3,256,956,976,794.83	3,408,475,178,261.23
18.	Kab. Semarang	4,354,164,279,634.24	4,653,078,851,968.27	4,849,514,934,945.45
19.	Kota Tegal	2,356,124,968,117.37	2,384,923,191,241.85	2,352,813,494,652.12

3. Hasil Perhitungan *Leverage* (X2)

No.	Kabupaten / Kota	Leverage (DER)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	0.00342	0.00628	0.00478
2.	Kab. Banyumas	0.00747	0.00777	0.00829
3.	Kab. Blora	0.00901	0.01147	0.00829
4.	Kab. Boyolali	0.01031	0.00692	0.00740
5.	Kab. Brebes	0.01850	0.01852	0.00733
6.	Kab. Demak	0.00458	0.00440	0.00285
7.	Kab. Karanganyar	0.00395	0.02279	0.00804
8.	Kab. Kebumen	0.00430	0.00629	0.00932
9.	Kab. Kendal	0.00738	0.00770	0.01560
10.	Kab. Kudus	0.00651	0.01033	0.00854
11.	Kab. Pati	0.00247	0.00248	0.00281
12.	Kab. Pemasang	0.00647	0.00763	0.01309
13.	Kab. Purbalingga	0.01520	0.00863	0.01436
14.	Kab. Purworejo	0.00832	0.00946	0.00971
15.	Kab. Wonogiri	0.02444	0.00699	0.00775
16.	Kab. Wonosobo	0.00326	0.00212	0.00199
17.	Kab. Magelang	0.00632	0.00420	0.00619
18.	Kab. Semarang	0.00622	0.00789	0.00811
19.	Kota Tegal	0.01989	0.01371	0.01876

Sumber: Hasil olah data Ms Excel (2022)

## LAMPIRAN 5

### Data Penelitian Variabel Ukuran Daerah / Size (X3)

#### 1. Data Total Aset

No.	Kabupaten / Kota	Aset		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	4,355,751,220,425.70	4,469,370,847,873.60	4,528,919,724,975.62
2.	Kab. Banyumas	6,419,865,052,453.72	6,226,652,415,512.68	6,540,515,839,032.71
3.	Kab. Blora	2,916,854,233,298.52	3,362,562,896,873.61	3,382,901,824,152.56
4.	Kab. Boyolali	3,184,190,479,588.44	3,770,144,077,202.44	4,227,690,989,734.95
5.	Kab. Brebes	3,366,883,430,103.06	4,187,462,596,274.50	6,626,878,048,524.50
6.	Kab. Demak	5,084,647,496,851.59	5,450,473,201,190.25	5,697,120,718,057.40
7.	Kab. Karanganyar	3,190,931,038,152.83	3,476,942,970,374.69	6,132,256,105,265.02
8.	Kab. Kebumen	4,548,688,282,913.09	4,482,323,838,554.00	4,525,738,172,682.03
9.	Kab. Kendal	3,081,268,497,841.06	3,026,908,855,357.08	3,130,779,619,644.84
10.	Kab. Kudus	4,159,213,413,942.49	4,468,531,280,044.62	4,670,496,301,414.84
11.	Kab. Pati	6,190,923,149,283.96	6,439,754,615,979.58	6,254,897,635,666.18
12.	Kab. Pemasang	3,512,512,785,581.85	3,786,927,056,410.92	3,803,001,551,340.07
13.	Kab. Purbalingga	2,621,915,743,198.10	2,846,328,687,092.87	2,880,905,345,974.06
14.	Kab. Purworejo	2,772,960,299,931.45	2,987,231,520,048.19	3,108,457,930,732.89
15.	Kab. Wonogiri	3,441,897,165,791.76	3,740,376,254,030.79	3,821,069,295,193.67
16.	Kab. Wonosobo	3,070,057,342,570.34	3,390,531,356,578.04	3,611,479,941,298.04
17.	Kab. Magelang	3,141,760,777,818.53	3,270,629,440,572.02	3,429,577,837,888.45
18.	Kab. Semarang	4,381,254,462,290.56	4,689,787,427,166.48	4,888,861,215,817.10
19.	Kota Tegal	2,402,980,382,890.01	2,417,612,856,682.85	2,396,957,279,062.12

#### 2. Hasil Perhitungan LN Total Aset

No.	Kabupaten / Kota	Ln Total Aset		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	29.10252	29.12827	29.14150
2.	Kab. Banyumas	29.49042	29.45986	29.50904
3.	Kab. Blora	28.70153	28.84372	28.84975
4.	Kab. Boyolali	28.78922	28.95813	29.07268
5.	Kab. Brebes	28.84501	29.06312	29.52215
6.	Kab. Demak	29.25725	29.32672	29.37098
7.	Kab. Karanganyar	28.79133	28.87717	29.44458
8.	Kab. Kebumen	29.14586	29.13116	29.14080
9.	Kab. Kendal	28.75636	28.73856	28.77230
10.	Kab. Kudus	29.05635	29.12808	29.17229
11.	Kab. Pati	29.45411	29.49351	29.46439
12.	Kab. Pemasang	28.88735	28.96258	28.96681
13.	Kab. Purbalingga	28.59493	28.67705	28.68913
14.	Kab. Purworejo	28.65094	28.72537	28.76515
15.	Kab. Wonogiri	28.86704	28.95021	28.97155
16.	Kab. Wonosobo	28.75272	28.85201	28.91514

17.	Kab. Magelang	28.77580	28.81600	28.86346
18.	Kab. Semarang	29.10836	29.17641	29.21798
19.	Kota Tegal	28.50773	28.51380	28.50522

Sumber: Hasil olah data Ms Excel (2022)



## LAMPIRAN 6

### Data Penelitian Variabel Kontrol

#### 1. Jumlah Penduduk

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	918,219	923,192	1,017,767
2.	Kab. Banyumas	1,679,124	1,693,006	1,776,918
3.	Kab. Blora	862,110	865,013	884,333
4.	Kab. Boyolali	1,437,225	984,807	1,062,713
5.	Kab. Brebes	1,802,829	1,809,096	1,184,947
6.	Kab. Demak	1,151,796	1,162,805	1,203,956
7.	Kab. Karanganyar	879,078	886,519	1,240,600
8.	Kab. Kebumen	1,195,092	1,197,982	1,350,438
9.	Kab. Kendal	964,106	971,086	1,018,505
10.	Kab. Kudus	861,430	871,311	849,184
11.	Kab. Pati	1,253,299	1,259,590	1,324,188
12.	Kab. Pemasang	1,299,724	1,302,813	1,471,489
13.	Kab. Purbalingga	925,193	933,989	998,561
14.	Kab. Purworejo	716,477	718,316	769,880
15.	Kab. Wonogiri	957,106	959,492	1,043,177
16.	Kab. Wonosobo	787,384	790,504	879,124
17.	Kab. Magelang	1,279,625	1,290,591	1,299,859
18.	Kab. Semarang	1,040,629	1,053,786	1,053,094
19.	Kota Tegal	249,003	249,905	273,825

#### 2. Jumlah Anggota DPRD

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Anggota DPRD		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banjarnegara	50	50	50
2.	Kab. Banyumas	50	50	50
3.	Kab. Blora	45	45	45
4.	Kab. Boyolali	50	45	45
5.	Kab. Brebes	50	50	50
6.	Kab. Demak	50	50	50
7.	Kab. Karanganyar	45	45	50
8.	Kab. Kebumen	50	50	50
9.	Kab. Kendal	45	45	45
10.	Kab. Kudus	45	45	45
11.	Kab. Pati	50	50	50
12.	Kab. Pemasang	50	50	50
13.	Kab. Purbalingga	45	45	45

14.	Kab. Purworejo	45	45	45
15.	Kab. Wonogiri	50	50	50
16.	Kab. Wonosobo	45	45	45
17.	Kab. Magelang	50	50	50
18.	Kab. Semarang	50	50	50
19.	Kota Tegal	30	30	30



## LAMPIRAN 7

### Hasil Olah Data SPSS

#### 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemda Intergovernmental Revenue	57	.000	.182	.07271	.042049
Leverage Size	57	.369	.544	.44085	.030596
Jumlah Penduduk	57	.002	.024	.00872	.005193
Jumlah Anggota DPRD	57	28.505	29.522	28.9949	.281092
Valid N (listwise)	57	12.425	14.408	13.8188	.397112
	57	30.000	50.000	47.0175	4.711275

#### 2. Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		57
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03535815
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.972
Asymp. Sig. (2-tailed)		.301
Exact Sig. (2-tailed)		.277
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

## 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.526	.469		1.121	.268
Intergovernmental Revenue	-.075	.114	-.113	-.663	.510
Leverage Size	-.118	.667	-.030	-.178	.860
Jumlah Penduduk	-.004	.015	-.061	-.301	.764
Jumlah Anggota DPRD	-.032	.019	-.629	-1.745	.087
	.002	.002	.557	1.433	.158

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## 4. Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Intergovernmental Revenue	.631	1.586
Leverage Size	.636	1.572
Jumlah Penduduk	.439	2.278
Jumlah Anggota DPRD	.140	7.135
	.120	8.321

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

## 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.852	.842		-3.387	.001
	Intergovernmental Revenue	.274	.204	.199	1.343	.185
	Leverage Size	-2.934	1.195	-.362	-2.454	.018
	Jumlah Penduduk	.073	.027	.487	2.740	.008
	Jumlah Anggota DPRD	-.011	.003	-1.214	-3.575	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

## 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 <sup>a</sup>	.293	.224	.03705088

a. Predictors: (Constant), Jumlah Anggota DPRD (K2), Intergovernmental Revenue (X1), Leverage (X2), Size (X3), Jumlah Penduduk (K1)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda (Y)

## LAMPIRAN 8

## Distribusi Nilai T Tabel

df	One-Tailed Test						
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	Two-Tailed Test						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002
41	0,680521	1,302543	1,682878	2,019541	2,420803	2,701181	3,301273
42	0,680376	1,302035	1,681952	2,018082	2,418470	2,698066	3,295951
43	0,680238	1,301552	1,681071	2,016692	2,416250	2,695102	3,290890
44	0,680107	1,301090	1,680230	2,015368	2,414134	2,692278	3,286072
45	0,679981	1,300649	1,679427	2,014103	2,412116	2,689585	3,281480
46	0,679861	1,300228	1,678660	2,012896	2,410188	2,687013	3,277098
47	0,679746	1,299825	1,677927	2,011741	2,408345	2,684556	3,272912
48	0,679635	1,299439	1,677224	2,010635	2,406581	2,682204	3,268910
49	0,679530	1,299069	1,676551	2,009575	2,404892	2,679952	3,265079
50	0,679428	1,298714	1,675905	2,008559	2,403272	2,677793	3,261409
51	0,679331	1,298373	1,675285	2,007584	2,401718	2,675722	3,257890
52	0,679237	1,298045	1,674689	2,006647	2,400225	2,673734	3,254512
53	0,679147	1,297730	1,674116	2,005746	2,398790	2,671823	3,251268
54	0,679060	1,297426	1,673565	2,004879	2,397410	2,669985	3,248149
55	0,678977	1,297134	1,673034	2,004045	2,396081	2,668216	3,245149
56	0,678896	1,296853	1,672522	2,003241	2,394801	2,666512	3,242261
57	0,678818	1,296581	1,672029	2,002465	2,393568	2,664870	3,239478
58	0,678743	1,296319	1,671553	2,001717	2,392377	2,663287	3,236795
59	0,678671	1,296066	1,671093	2,000995	2,391229	2,661759	3,234207
60	0,678601	1,295821	1,670649	2,000298	2,390119	2,660283	3,231709
61	0,678533	1,295585	1,670219	1,999624	2,389047	2,658857	3,229296
62	0,678467	1,295356	1,669804	1,998972	2,388011	2,657479	3,226964
63	0,678404	1,295134	1,669402	1,998341	2,387008	2,656145	3,224709
64	0,678342	1,294920	1,669013	1,997730	2,386037	2,654854	3,222527
65	0,678283	1,294712	1,668636	1,997138	2,385097	2,653604	3,220414
66	0,678225	1,294511	1,668271	1,996564	2,384186	2,652394	3,218368
67	0,678169	1,294315	1,667916	1,996008	2,383302	2,651220	3,216386
68	0,678115	1,294126	1,667572	1,995469	2,382446	2,650081	3,214463
69	0,678062	1,293942	1,667239	1,994945	2,381615	2,648977	3,212599
70	0,678011	1,293763	1,666914	1,994437	2,380807	2,647905	3,210789
71	0,677961	1,293589	1,666600	1,993943	2,380024	2,646863	3,209032
72	0,677912	1,293421	1,666294	1,993464	2,379262	2,645852	3,207326
73	0,677865	1,293256	1,665996	1,992997	2,378522	2,644869	3,205668
74	0,677820	1,293097	1,665707	1,992543	2,377802	2,643913	3,204056
75	0,677775	1,292941	1,665425	1,992102	2,377102	2,642983	3,202489
76	0,677732	1,292790	1,665151	1,991673	2,376420	2,642078	3,200964
77	0,677689	1,292643	1,664885	1,991254	2,375757	2,641198	3,199480
78	0,677648	1,292500	1,664625	1,990847	2,375111	2,640340	3,198035
79	0,677608	1,292360	1,664371	1,990450	2,374482	2,639505	3,196628
80	0,677569	1,292224	1,664125	1,990063	2,373868	2,638691	3,195258